

## ANALISIS BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN SAROLANGUN

Leni Setiyani

Program Studi Keuangan Daerah Universitas Jambi

### Abstrak

*Penelitian ini berjudul Analisis Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sarolangun selama periode 2009-2013, dibawah bimbingan Bapak Selamat Rahmadi, SE.M.Si. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan belanja daerah di Kabupaten Sarolangun, hubungan belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sarolangun periode 2009-2010. Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata perkembangan belanja daerah di Kabupaten Sarolangun sebesar 10.47 persen pertahun, sementara rata-rata belanja langsung sebesar 10.86 persen, belanja tidak langsung sebesar 14.38 persen pertahun. Sedangkan hubungan belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan program SPSS 16 diperoleh hasil bahwa belanja langsung dan belanja tidak langsung berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sarolangun.*

**Kata kunci :** Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

### Abstract

*This research is titled Analysis of Regional Expenditure on Economic Growth in Sarolangun Regency during the 2009–2013 Period, under the supervision of Mr. Selamat Rahmadi, SE., M.Si. The purpose of this study is to examine and analyze the development of regional expenditure in Sarolangun Regency and the relationship between direct and indirect expenditure and economic growth in Sarolangun Regency during the 2009–2013 period. The results of the study show that the average annual growth of regional expenditure in Sarolangun Regency was 10.47 percent, while direct expenditure grew by an average of 10.86 percent, and indirect expenditure by 14.38 percent per year. Furthermore, using SPSS 16, the analysis revealed that both direct and indirect expenditures have a positive relationship with economic growth in Sarolangun Regency.*

**Keywords:** Regional Expenditure, Economic Growth

### 1. PENDAHULUAN

Belanja Daerah dalam penyusunan anggaran sewajarnya berorientasi kepada publik besarnya alokasi anggaran yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Sebagai gambaran dapat dilihat pada realisasi belanja daerah Kabupaten Sarolangun selalu mengalami perubahan setiap tahunnya baik mengalami peningkatan maupun mengalami penurunan. Belanja daerah Kabupaten Sarolangun dari tahun 2009-2010 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2011 mengalami peningkatan. Belanja daerah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2009 sebesar 587.534.534.534 kemudian menurun menjadi sebesar 511.649.691.846. Tahun 2010 belanja daerah Kabupaten Sarolangun sebesar 511.649.691.846, meningkat menjadi sebesar 709.927.813.915 di tahun 2011 dengan persentase 38,75%.

Untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung Kabupaten Sarolangun juga mengalami perubahan persentase setiap tahunnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang umum digunakan dalam

menentukan keberhasilan pembangunan. Dari penelitian yang dilakukan dapat kita lihat bahwa tingkat PDRB harga konstan 2000 Kabupaten Sarolangun selama tahun 2009-2013 mengalami peningkatan. Tingkat PDRB harga konstan 2000 pada tahun 2010 yaitu sebesar 1.231.627.000, dan tingkat PDRB harga konstan 2000 pada tahun 2013 yaitu sebesar 1.559.394.000.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Landasan Teori 2.1.1. Keuangan Negara

Secara umum keuangan negara diartikan sebagai semua hal yang berkaitan dengan masalah penerimaan dan pengeluaran Negara.

#### Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran

#### Belanja daerah

Menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

#### Belanja langsung

Menurut Nurlan Darise (2007) Belanja Langsung adalah belanja yang penganggarnya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan.

#### Belanja Tidak Langsung

Menurut permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

#### Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kenaikan output perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita (Budiono, 1999 dalam pungi Ardhani 2011).

#### Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Agustinus Harsono dengan judul skripsi “analisis belanja pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2003-2006”.

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan Putra, dengan judul “analisis alokasi belanja pelayanan publik pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pada kabupaten Pontianak 2003-2005”.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan mempelajari literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal.

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sarolangun
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sarolangun
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sarolangun.

### Metode Analisis Data

- Untuk menghitung perkembangan belanja daerah dapat menggunakan rumus :  
(Halim, 2006)

$$PBD = \frac{BDt - BDt-1}{BDt-1} \times 100\%$$

- b. Untuk mengetahui hubungan belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun digunakan analisis korelasi person menggunakan program SPSS 16 dengan rumus :

$$R_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$$

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Perkembangan Belanja Daerah di Kabupaten Sarolangun Tahun 2009-2013

Tabel 1.

##### Perkembangan Jenis-jenis Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 – 2013

| Thn              | Jenis Belanja Daerah |              |                        |              | Total Belanja Daerah | Perk (%)     |
|------------------|----------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------------|--------------|
|                  | Belanja Langsung     | Perk (%)     | Belanja Tidak Langsung | Perk (%)     |                      |              |
| 2009             | 370.127.437.811      | -            | 217.407.096.723        | -            | 587.534.534.534      | -            |
| 2010             | 256.215.199.714      | -30,77       | 255.434.492.132        | 17,49        | 511.649.691.846      | -12,91       |
| 2011             | 387.577.166.032      | 51,27        | 322.350.647.883        | 26,19        | 709.927.813.915      | 38,75        |
| 2012             | 551.771.793.978      | 42,36        | 323.882.801.355        | 0,47         | 875.654.595.333      | 23,34        |
| 2013             | 444.832.832.713      | -19,38       | 367.232.699.996        | 13,38        | 812.065.532.709      | -7,26        |
| <b>Rata-rata</b> |                      | <b>10,86</b> |                        | <b>14,38</b> |                      | <b>10,47</b> |

Sumber : Data diolah

##### Hubungan belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi

Tabel 2.

##### Hubungan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarolangun 2009 – 2013

| Control Variables |                        |                         | Belanja Langsung | Belanja Tidak Langsung | Pertumbuhan Ekonomi |
|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|---------------------|
|                   | Belanja Langsung       | Correlation             | 1.000            | -.045                  | <b>.449</b>         |
|                   |                        | Significance (1-tailed) | .                | .478                   | .276                |
|                   |                        | Df                      | 0                | 2                      | 2                   |
|                   | Belanja Tidak Langsung | Correlation             | -.045            | 1.000                  | <b>.870</b>         |
|                   |                        | Significance (1-tailed) | .478             | .                      | .065                |
|                   |                        |                         |                  |                        |                     |

|                     |                        |                         |       |       |       |
|---------------------|------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|
|                     |                        | Df                      | 2     | 0     | 2     |
|                     | Pertumbuhan Ekonomi    | Correlation             | .449  | .870  | 1.000 |
|                     |                        | Significance (1-tailed) | .276  | .065  | .     |
|                     |                        | Df                      | 2     | 2     | 0     |
| Pertumbuhan Ekonomi | Belanja Langsung       | Correlation             | 1.000 | -.989 |       |
|                     |                        | Significance (1-tailed) | .     | .047  |       |
|                     |                        | Df                      | 0     | 1     |       |
|                     | Belanja Tidak Langsung | Correlation             | -.989 | 1.000 |       |
|                     |                        | Significance (1-tailed) | .047  | .     |       |
|                     |                        | Df                      | 1     | 0     |       |

a. Cells contain zero-order (Pearson) correlations.

b. Data diolah menggunakan Program Spss 16.

### Pembahasan

Data perkembangan belanja daerah Kabupaten Sarolangun dari tahun 2009 hingga 2013 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, baik pada belanja langsung maupun tidak langsung. Secara umum, total belanja daerah mengalami fluktuasi yang mencerminkan respons terhadap kondisi fiskal dan prioritas pembangunan daerah. Pada tahun 2010, total belanja daerah mengalami penurunan sebesar 12,91% dibanding tahun sebelumnya, yang sebagian besar disebabkan oleh turunnya belanja langsung sebesar 30,77%. Namun, tren ini berubah di tahun 2011, di mana terjadi lonjakan belanja langsung sebesar 51,27% dan belanja tidak langsung sebesar 26,19%, sehingga mendorong kenaikan total belanja daerah sebesar 38,75%.

Peningkatan ini berlanjut pada 2012, meskipun belanja tidak langsung hanya tumbuh 0,47%, belanja langsung tetap naik cukup tinggi yaitu 42,36%. Namun pada 2013, kembali terjadi penurunan, terutama pada belanja langsung (-19,38%) yang berdampak pada turunnya total belanja daerah sebesar 7,26%.

Rata-rata pertumbuhan belanja langsung (10,86%) ternyata masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung (14,38%), yang menandakan alokasi anggaran masih lebih dominan kepada belanja yang bersifat administratif daripada yang langsung menyentuh pembangunan.

Dari analisis korelasi, terlihat bahwa hubungan antara belanja tidak langsung dan pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien korelasi sebesar 0,870 dengan tingkat signifikansi 0,065, yang menunjukkan hubungan positif yang kuat dan hampir signifikan secara statistik (mendekati nilai kritis 0,05). Sementara itu, belanja langsung memiliki korelasi sedang dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,449, namun tidak signifikan ( $p = 0,276$ ). Ini menunjukkan bahwa meskipun secara teoritis belanja langsung seharusnya berdampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi, namun dalam kasus Sarolangun, belanja tidak langsung justru lebih berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut.

Hal ini dapat menjadi masukan penting dalam perencanaan anggaran daerah agar proporsi belanja diarahkan secara lebih strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 – 2013 terjadi secara fluktuatif dengan rata-rata sebesar 10.47 persen.

1. Hubungan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarolangun selama periode tahun 2009 – 2013 terjadi secara signifikan dengan hubungan korelasi Belanja Langsung sebesar 0.449 dan dengan hubungan Korelasi Belanja Tidak Langsung sebesar 0.870 terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan sisanya di pengaruhi oleh factor lain.

### Saran

Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun agar dapat meningkatkan lagi perkembangan Belanja Daerah melalui peningkatan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Untuk meningkatkan hubungan korelasi belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten sarolangun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boediono, 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Penerbit BPFE, Yogyakarta. Badan pusat statistik (BPS) *Kabupaten Sarolangun dalam angka berbagai tahun*.
- Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) *Kabupaten Sarolangun, 2013*.
- Dahmiri, D., & Indrawijaya, S. (2017). The Community Satisfaction Index (CSI) Toward Public Service in Department of Population and Civil Registration in Sarolangun Jambi Province, Indonesia. *Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(5), 31-38.
- Dinas Pendapata *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Sarolangun, 2013*.
- Halim, Abdul 2004, *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi revisi. Penerbit selemba empat*. Jakarta.
- Halim, Abdul 2006, *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi tiga. Penerbit salemba empat*. Jakarta.
- Indonesia, *Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*.
- Khotami 2013, *Analisis Hubungan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sarolangun. Jambi*.
- Kuswani ira 2013, *Analisis Alokasi Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun 2006- 2007*. Skripsi Universitas Jambi. Kampus Sarolangun.
- Mahmudi 2007, *.Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPM*. Yogyakarta.
- Nurlan, Darise. 2007. *Pengelolaan Keuangan Padan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Penerbit PT Indeks. Jakarta.
- Nurlan, Darise. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi kedua PT Macanan Jaya Cemerlang. Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan

\_\_\_\_\_, UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

\_\_\_\_\_, UU RI No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah

\_\_\_\_\_, UU RI No 54 tahun 1999 tentang *Pembentukan Kabupaten Sarolangun Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi. Kabupaten Tanjabtim*.

\_\_\_\_\_, 2000 Undang-undang No 33 Tahun 2004, *tentang Perimbangan Keuangan Pusat*

*dan Pemerintah Daerah.*

-----,Modul Ekonometrika. Program Megister Ekonomi Pembangunan Universitas Jambi, tidak dipublikasikan.

Pusri Wahyuni 2013, *Analisis Alokasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun*.Jambi.

*Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Ritonga 2009, *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*. Sekolah Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta.

SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Propinsi Jambi. Sugiyono : 2009 *Statistika untuk penelitian*.

... , <http://www.google.co.id> (diakses Juni 2015)